

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 992228
Nama Pemda : Kab. Barito Kuala
Verifikator :

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,2	4,7	
Tingkat Kemiskinan	3,96 - 3,46	4,21	

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)		
Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
Ketahanan Pangan (Perikanan)		
Ketahanan Pangan (Pertanian)		
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)		
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)		

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, karet, kopi, ikan haruan, kepiting mangrove, dll); • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	none	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan ini dijabarkan melalui pilar-pilar berikut: 1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah; 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, dan Melayani. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan tersebut, serta evaluasi terhadap realisasi indikator makro tahun-tahun sebelumnya, maka target indikator ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,7%		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.	none	Dalam Dokumen Rancangan KUA BAB III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD di luar belanja pegawai/gaji, sesuai amanat konstitusional dan untuk mendukung penguatan layanan kesehatan dasar di masyarakat. Selain itu, pada BAB IV poin 4.2.1 telah dinarasikan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan di kecamatan-kecamatan yang belum optimal, serta melanjutkan penyempurnaan layanan Klinik Utama Setara sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Serta pada poin 4.2.3 telah dinarasikan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing – dengan penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penurunan angka stunting dan kemiskinan.		
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui enguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui enguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026		
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM berbasis desa, dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan pemerataan wilayah. Selain itu, Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menarasikan Penguatan kapasitas desa, khususnya melalui peningkatan jumlah desa mandiri yang difasilitasi dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama (Bumdesma) yang aktif dan produktif, serta pada poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menjadikan Pemenuhan kewajiban alokasi belanja sesuai dengan mandatory spending, yakni Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah sebagai prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang bertema ■Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM		

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

PDRD

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							